

KAJIAN STRATEGI PENERAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(Study Of Sustainable Development Implementation Strategy)

Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda^{1*)}, I Gede Andy Andika Parahita¹⁾

¹⁾Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Badung, Provinsi Bali, 80361

Article Info:

Received: June 23, 2022

Accepted: July 27, 2022

Keywords:

Economy; environment;
development; socio-cultural;
sustainable .

Corresponding Author:

Ngakan Gede Agung Khrisna
Wiryananda
Teknik Lingkungan, Fakultas
Teknik, Universitas Udayana,
Badung, Bali dan 80361
Tel: +6281805333704
Email:
Khrisna.wiryananda@unud.ac.id

Abstrak, pembangunan berkelanjutan memerlukan tiga aspek yang harus seimbang, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu merumuskan strategi untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang didapat dari praktik-praktik yang sudah dilakukan di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu mendapatkan enam strategi yang dapat digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Enam strategi tersebut, yaitu pemenuhan hak sosial dan keamanan, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal, penyediaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, komitmen politik dan hukum yang kuat, serta kolaborasi berbagai pihak.

Abstract, sustainable development requires three aspects that must be balanced, namely economic, socio-cultural, and environmental. The implementation of sustainable development that has been carried out has not shown maximum results. The purpose of this research is to formulate a strategy to implement sustainable development derived from practices that have been carried out in various countries. This research uses literature study method with descriptive analysis. The results of this study are to obtain six strategies that can be used to achieve sustainable development. The six strategies are the fulfillment of social and security rights, community participation and utilization of local wisdom, provision of infrastructure, utilization of technology, information, and communication, strong political and legal commitment, and collaboration of various parties.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan sudah mulai dikenal sejak diterbitkannya buku berjudul *Our Common Future* oleh *World Commission on Environment and Development* atau yang dikenal dengan *Brundtland Commission* pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka (*World Commission on Environment and Development, 1987*). Definisi lain dari pembangunan berkelanjutan yaitu suatu proses dinamis perubahan dari eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang dibuat sesuai dengan masa depan serta kebutuhan saat ini (Rogers *et al.*, 2008).

Terjadi permasalahan secara global yang harus menjadi perhatian bersama seperti, perubahan iklim, kemiskinan, berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya krisis kepercayaan, dan lain sebagainya (Broman dan Robert, 2015). Sehingga perlu adanya pendekatan baru untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan tersebut, yaitu pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu kritik terhadap pembangunan konvensional. Dalam hal ini, pembangunan konvensional hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja tanpa memikirkan terkait dengan aspek sosial budaya dan lingkungan. Terdapat tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang harus tumbuh secara bersama-sama, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Secara global telah ada kesepakatan terkait dengan pembangunan berkelanjutan yaitu mengacu pada dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam dokumen SDGs tersebut telah dijabarkan 17 tujuan dan 169 target yang akan diacu selama lima belas tahun mendatang. Tujuh belas tujuan tersebut, yaitu (*Sustainable Development Knowledge Platform*, 2016): *no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, dan partnerships for the goals*. Perlu upaya bersama untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Penerapan pembangunan berkelanjutan baik di negara maju maupun negara berkembang masih sulit dilakukan. Terutama bagi negara-negara berkembang pembangunan berkelanjutan harus dilihat dari interaksi berbagai faktor, khususnya kemiskinan, urbanisasi, dan pelestarian lingkungan (Cobbinah *et al.*, 2015). Permasalahan mendasar belum tercapainya pembangunan berkelanjutan yaitu tingkat pembangunan sosial ekonomi yang belum dicapai banyak negara, terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan dan teknologi, serta keragaman tujuan politik dan ekonomi secara global (Klarin, 2018). Indonesia juga sudah mengadopsi pembangunan berkelanjutan, namun belum terimplementasi secara maksimal (Yoriska, 2020). Sulit tercapainya tujuan dari pembangunan berkelanjutan disebabkan karena pembangunan berkelanjutan menyangkut permasalahan yang kompleks dan multidimensi, yang harus menggabungkan efisiensi dan pemerataan termasuk pemerataan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Ciegis *et al.*, 2009). Berdasarkan hal tersebut penerapan pembangunan berkelanjutan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan dan belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merumuskan strategi untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang didapat dari praktik-praktik yang sudah dilakukan di berbagai negara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Dalam studi literatur terdapat uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari sumber rujukan yang digunakan sebagai landasan kegiatan penelitian (Hasibuan, 2007). Cara perolehan data untuk studi literatur yaitu dengan membaca sumber yang relevan (Arikunto, 2013). Data pada penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber, yaitu buku, jurnal, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan menguraikan praktik pembangunan berkelanjutan di beberapa negara untuk selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi penerapan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Berkelanjutan di Negara Maju

Luksemburg, Swedia, Finlandia, Belanda, dan Denmark menduduki lima posisi teratas diantara negara-negara Uni Eropa lainnya yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Soja *et al.*, 2016). Luksemburg menjadi negara yang paling berhasil dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan program-program sosial, seperti program untuk penyandang disabilitas, orang tua, dan juga untuk anak-anak. Selain itu, program lainnya yang dilakukan yaitu dengan menarik tenaga kerja berkualitas. Jika dilihat dari peringkat lima besar adalah negara-negara skandinavia. Keberhasilan negara-negara skandinavia tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kenegaraan, universalisme, dan kesetaraan. Dalam hal ini, kenegaraan yang dimaksud adalah keterlibatan atau partisipasi aktif antara negara dan warganya. Universalisme dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak universal sosial untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga akan berdampak pada kesetaraan yang diindikasikan dengan perbedaan yang relatif kecil antar lapisan masyarakat.

Negara lainnya seperti Inggris dan Amerika Serikat menggunakan konsep 4S, yaitu *safe, sustainable, smart*, dan *strong* ke dalam pembangunan strategis nasionalnya (Kim *et al.*, 2008). Konsep *safe* berarti masyarakat dalam hidupnya dapat merasa aman dari berbagai gangguan seperti kecelakaan, kesehatan, dan bencana alam. Kesetaraan dan keharmonisan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diterapkan dalam konsep *sustainable*. Penyediaan infrastruktur oleh negara juga menjadi salah satu hal yang penting, baik itu infrastruktur fisik maupun infrastruktur perangkat lunak sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas. Hal tersebut masuk ke dalam konsep *smart*. Sedangkan konsep *strong* lebih kepada tingkat kompetitif negara yang tinggi.

Jepang juga secara umum menerapkan konsep 4S tersebut ke dalam pembangunan strategis nasionalnya. Selain itu, Jepang yang minim akan sumber daya alamnya lebih fokus pada sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Jepang menggunakan tradisi asli atau kearifan lokal yaitu Shinto dalam pembangunan berkelanjutan (Bonciu, 2007). Shinto adalah tradisi masyarakat Jepang terkait dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Shinto memiliki dua aspek utama yaitu pembaharuan dan sifat manusia. Terkait dengan pembaharuan atau pembangunan yaitu tradisi yang sudah ada lama di masyarakat Jepang dalam pembangunan kembali setelah terjadi bencana. Aspek sifat manusia menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia bersifat baik yang harus bersinar seperti cermin. Hal ini bermakna bahwa hal-hal negatif yang ada di Jepang harus dihapuskan akan Jepang dapat terus bersinar. Berdasarkan uraian tersebut sebenarnya Jepang dalam melakukan pembangunan berkelanjutan fokus pada sumber daya manusia yang berlandaskan tradisi yang kuat.

Negara Asia lainnya yang menerapkan konsep 4S dalam pembangunan berkelanjutan yaitu Korea Selatan (Moon, 2009). Korea Selatan menekankan pada jaringan masyarakat dalam hal memanfaatkan teknologi dan informasi yang canggih, aman, ramah lingkungan, dan memiliki daya saing nasional yang kuat. Selain itu, Korea Selatan juga memanfaatkan perekonomian yang sudah sangat kuat untuk meningkatkan dan mengimplementasikan strategi-strategi pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan.

Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang

Implementasi pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang tidak semudah di negara-negara maju. Seperti di India, permasalahan pembangunan berkelanjutan terletak pada banyaknya pengangguran dan kemiskinan (Singh dan Debnath, 2012). Permasalahan kemiskinan yang terjadi memiliki dampak pada aspek lingkungan dan kesehatan di negara tersebut. Dalam hal ini mempengaruhi masyarakat yang menggantungkan hidup dari alam atau lingkungan serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Aspek lingkungan juga mengalami permasalahan di India akibat dari tekanan ekonomi (Hauff *et al.*, 2013), terutama di daerah perkotaan yang tingkat urbanisasi dan industrialisasi sangat pesat. Meskipun selama dua puluh tahun terakhir perekonomian India secara makro mengalami tren yang positif, namun tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu, sistem kasta dan kesenjangan gender juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh India. Agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan, Pemerintah India harus melakukan strategi agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan melakukan intervensi di sektor Pendidikan dan ketenagakerjaan.

Sama halnya seperti di India, laju urbanisasi di sebagian besar Afrika juga akan mengalami peningkatan yang pesat sehingga berdampak pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (Cobbinah *et al.*, 2015). Urbanisasi yang terjadi diakibatkan oleh interaksi berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, pengembangan ruang dan tidak meratanya peluang kerja di perkotaan dan pedesaan. Laju urbanisasi akan berimplikasi pada berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan, adanya rumah kumuh, kelangkaan air dan sanitasi. Sehingga perlu dilakukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu isu terpenting di negara seperti Nepal. Permasalahan utama terkait pembangunan berkelanjutan di Nepal yaitu erosi tanah, degradasi lahan dan banjir (Acharya, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang tepat dan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam. Untuk itu, Pemerintah Nepal harus memberikan penekanan pada pendidikan lingkungan dan program kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam. Hal yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat, pemerataan dan pemanfaatan kearifan lokal. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, lembaga lokal

dan organisasi non-pemerintah juga sangat diperlukan. Agar pembangunan berkelanjutan dapat berhasil, penting untuk melakukan dukungan kepada para wirausahawan yang bergerak di bidang sosial agar menghasilkan metode-metode inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Azmat, 2013).

Perkotaan Curitiba di Brasil telah berhasil dalam hal peningkatan kualitas hidup yang disebabkan karena penggunaan sumber daya yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya timbulan sampah yang terjadi. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di negara maju atau berkembang, metabolisme perkotaan Curitiba menunjukkan penggunaan bahan dan energi per kapita yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan potensi pengayaan kondisi kehidupan yang lebih besar, namun di sisi lain mengingatkan bahwa ekspansi sosial dan ekonomi akan berimplikasi pada semakin banyaknya degradasi dan pencemaran, dan harus dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Perkotaan Curitiba menghadapi beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, seperti pertumbuhan wilayah yang tidak direncanakan karena pendudukan tanah secara illegal, kurangnya undang-undang yang secara tepat memperhitungkan jasa ekologis, fokus pada solusi paliatif daripada perencanaan jangka panjang, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan harus dipertimbangkan bersama dengan dampak lingkungan yang diakibatkannya, keduanya harus diukur sebaik mungkin dengan pendekatan metabolisme perkotaan (Conke dan Ferreira, 2015). Evaluasi produksi dan konsumsi sumber daya dan timbulan sampah harus menjadi kegiatan utama yang pasti akan membantu perencanaan kota, desain dan pengambilan keputusan. Selain memantau aliran metabolisme, di masa yang akan datang harus ada analisis distribusi bahan dan energi di dalam kota. Hal tersebut akan berguna untuk dapat mengungkapkan ketidaksetaraan penggunaan sumber daya di berbagai wilayah.

Daerah perkotaan Xi'an di Cina telah berkembang lebih dari sepuluh kali lipat selama seperempat abad terakhir (Ding *et al.*, 2015). Tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan penggunaan lahan yang besar sehingga berimplikasi terhadap menurunnya lahan subur di perkotaan Xi'an. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan yang lebih generatif. Dalam hal ini termasuk revitalisasi sistem perkotaan, kontrol bentuk perkotaan melalui perencanaan, konsultasi dan menginformasikan masyarakat lokal tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, serta koordinasi yang harmonis antara Lembaga yang berbeda.

Polandia telah berada pada jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang ada dalam SDGs. Hal tersebut terlihat dari 57 indikator menunjukkan perubahan ke arah yang positif dari total 73 indikator yang diteliti (Raszowski dan Bartniczak, 2019). Polandia dalam hal ini memungkinkan untuk menghapuskan kemiskinan, memastikan kualitas hidup yang lebih baik buat seluruh warganya serta kepedulian terhadap lingkungan alam. Polandia adalah negara yang relatif sangat terdesentralisasi, yaitu pemerintah daerah memiliki banyak tugas dalam hal merangsang pembangunan sosial-ekonomi termasuk memiliki alat dan publik untuk mendukung pembangunan keberlanjutannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Polandia memainkan peran penting dalam perjalanan menuju penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia belum menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi (Fauzi dan Oxtavianus, 2014). Hal ini dapat dilihat dari tren positif pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Lain halnya dengan aspek lingkungan yang mengalami tren sebaliknya, yaitu meningkatnya lahan kritis dan kualitas udara yang tercemar. Sehingga di Indonesia dapat dikatakan hanya aspek sosial dan ekonomi saja yang mengalami peningkatan, namun aspek lingkungan terabaikan.

Seluruh provinsi yang ada di Indonesia terindikasi belum mencapai pembangunan berkelanjutan yang sempurna (Sihombing, 2018). Telah dipetakan permasalahan yang dihadapi provinsi-provinsi di Indonesia terkait pembangunan berkelanjutan yang dibagi menjadi tiga kluster. Masing-masing kluster memiliki permasalahan yang berbeda. Untuk kluster pertama permasalahan yang dihadapi yaitu adanya ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi. Kluster kedua memiliki permasalahan utama terkait pengangguran. Sedangkan untuk kluster ketiga mempunyai permasalahan hampir di seluruh bidang pembangunan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan yang dilakukan sangat penting untuk proses pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam hal ini, untuk mencapai target SDGs dan ekonomi inklusif

sangat penting untuk dilakukan pemetaan permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan pemecahan masalahnya.

Indonesia memiliki beragam kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan. Terkait masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai prinsip bersama dari komunitas adat karena memiliki kebaikan religius kepada Tuhan (Bakti dan Sjafei, 2020). Dalam hal ini, kearifan lokal memiliki struktur keputusan adat terkait dengan menjaga atau mengelola alam agar dapat terus berlanjut. Namun, kearifan lokal ini sering diabaikan karena tidak dianggap tidak bisa diukur secara ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat adat agar dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, agar pembangunan berkelanjutan dapat berhasil maka diperlukan modal sosial yang mampu menjaga kerjasama antar lembaga pemerintah, serta sinergi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Suparmoko, 2020).

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah masih menemui beberapa permasalahan. Munculnya permasalahan tersebut diakibatkan oleh pembangunan yang terlalu fokus ke aspek ekonomi sehingga aspek lingkungan menjadi terabaikan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam konteks otonomi daerah, yaitu ego sektoral dalam daerah dan antar daerah, kurangnya pendanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup, lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan, rendahnya komitmen politik kepala daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat (Rusli *et al.*, 2020) (Rozikin, 2012). Untuk mengatasi masalah tersebut maka aspek perencanaan dan pelaksanaan yang baik sangat diperlukan disertai dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Selain itu, aspek kelembagaan dan penegakan hukum juga sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu memiliki fungsi untuk kontrol dan evaluasi (Sudrajat, 2018).

Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan cara mengembangkan kerjasama internasional (Isnaeni, 2013). Seperti yang terjadi di Pemerintah Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Kitakyushu yang memberikan banyak manfaat, yaitu adanya terobosan yang terbukti dapat mengurangi masalah persampahan kota. Namun, yang esensial dari kerja sama tersebut adalah tumbuhnya kesadaran dan partisipasi publik. Hal tersebut mampu menciptakan mekanisme demokrasi partisipatoris yang dapat menopang keberlanjutan dari kerja sama internasional tersebut.

Strategi Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, yaitu terkait dengan pesatnya laju urbanisasi dan industrialisasi. Hal tersebut disebabkan oleh interaksi berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, pengembangan ruang, dan tidak meratanya peluang kerja. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut diperparah dengan anggaran yang terbatas, kurangnya undang-undang yang memperhatikan ekologis dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan pembelajaran dari praktik-praktik penerapan pembangunan berkelanjutan dari berbagai negara termasuk Indonesia, maka dapat dirumuskan enam strategi yang dapat digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pemenuhan hak sosial dan keamanan. Pemenuhan hak-hak sosial harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak sosial tersebut. Dengan adanya pemenuhan terhadap hak sosial seluruh masyarakat maka akan berdampak pada mengecilnya perbedaan antar lapisan masyarakat atau terciptanya kesetaraan. Keamanan yang dimaksud yaitu masyarakat memiliki rasa aman dari berbagai gangguan seperti kesehatan, kecelakaan, dan bencana alam. Hal ini juga berarti harus adanya sistem jaminan sosial kepada seluruh masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal. Partisipasi aktif dari masyarakat berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tersebut harus masuk ke semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Partisipasi masyarakat tersebut juga termasuk didalamnya yaitu masyarakat kurang mampu dan masyarakat adat yang harus diperhatikan. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal yang dimiliki juga seharusnya dapat digunakan diseluruh proses pembangunan.
3. Penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur baik dalam bentuk fisik maupun perangkat lunak sangat penting. Adanya infrastruktur akan membantu terkait dengan aksesibilitas yang ujungnya akan

berdampak pada peningkatan produktivitas dari masyarakat. Infrastruktur juga tidak terbatas pada infrastruktur yang mendukung aspek ekonomi saja, tetapi juga infrastruktur yang terkait dengan aspek sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.

4. Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Pada era industrialisasi 4.0 sekarang ini, pemanfaatan TIK menjadi sangat penting dan relevan. Hal tersebut dapat membantu dan memudahkan kehidupan masyarakat, baik untuk meningkatkan ekonomi, menjalankan kehidupan sosial budaya, dan untuk menjaga lingkungan. Terkait hal tersebut berarti harus adanya pemerataan akses untuk masyarakat dalam memanfaatkan TIK tersebut.
5. Komitmen politik dan hukum yang kuat. Politik menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena perlu adanya komitmen yang kuat agar arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus seimbang dengan aspek sosial budaya dan lingkungan. Pertimbangan politik anggaran juga penting, agar anggaran yang terbatas dapat fokus digunakan untuk program-program yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, produk hukum yang ada juga harus memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan didalamnya. Hal yang harus diperhatikan juga yaitu terkait dengan penegakan hukum agar benar-benar dilakukan dengan benar dan adil. Serta pencegahan dan penegakan hukum terkait korupsi juga harus dilakukan.
6. Kolaborasi berbagai pihak. Permasalahan pembangunan berkelanjutan yang sangat kompleks tidak akan bisa diselesaikan sendiri. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat termasuk masyarakat miskin dan masyarakat adat, lembaga non pemerintah, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tidak terbatas terjadi hanya didalam negeri saja, tetapi juga dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama lintas negara.

KESIMPULAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan masih belum dicapai dengan maksimal di berbagai negara. Terdapat enam strategi yang dapat digunakan untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. Strategi tersebut, yaitu pemenuhan hak sosial dan keamanan, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal, penyediaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, komitmen politik dan hukum yang kuat, serta kolaborasi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Klarin, T. 2018. The concept of sustainable development: from its beginning to the contemporary issues. *Zagreb International Review of economics and business*, **21 (1)**: 67–94.
- Yorisca, Y. 2020. Pembangunan hukum yang berkelanjutan: langkah penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, **17 (1)**: 98–111.
- Raszkowski, A dan Bartniczak. 2019. On the road to sustainability: implementation of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDG) in Poland. *Sustainability*, **11 (366)**: 1–20.
- Bakti dan Sjafei, M. S. 2020. Paradigma penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, **4 (2)**: 173–184.
- Acharya, U. 2021. Sustainable Development Practices in Developing Countries: Major Drivers and Future Discourse. *Nepalese Journal of Development and Rural Studies*, **18**: 61–66.
- Sihombing, P. R. 2018. Pemetaan masalah pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia: Implementasi Analisis Kluster. *Seminar nasional statistika FMIPA UNPAD 2018 (SNS VII)*.
- Suparmoko, M. 2020. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, **9 (1)**: 39–50.
- Sudrajat, A. S. E. 2018. Pilar pembangunan berkelanjutan: kajian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kampung batik rejomulyo semarang timur. *Riptek*, **12 (1)**: 83–88.
- Ciegis, R. Ramanauskiene, J. Martinkus, B. 2009. The concept of sustainable development and its use for sustainable scenarios. *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, **2**.

- Conke, L. S dan Ferreira T. L. 2015. Urban metabolism: measuring the city's contribution to sustainable development. *Environmental Pollution*, **202**: 146–152.
- Ding, X. S., Zhong, W., Shearmur, R. G., Zhang, X. 2015. An inclusive model for assessing the sustainability of cities in developing countries-trinity of cities' sustainability from spatial, logical and time dimensions (TCS-SLTD). *Journal of Cleaner Production*, **109**: 62–75.
- Azmat, F. 2013. Sustainable development in developing countries: the role of social entrepreneurs. *International Journal of Public Administration*, **36**.
- Broman, G. I dan Robert, K. H. 2015. A framework for strategic sustainable development. *Journal of Cleaner Production*.
- Rusli, Z., Adianto., Mashur, D. 2020. *Pembangunan berkelanjutan dalam bingkai otonomi daerah*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur penelitian: Suatu pendektan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isnaeni, N. 2013. Peran strategis pemerintah daerah dalam kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan. *Global & Strategis*, **7 (1)**: 123–138.
- World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. United Nations.
- Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2008). An introduction to sustainable development. London: Earthscan.
- Sustainable Development Knowledge Platform. (2016). <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.
- Cobbinah, P. B., Erdiaw, M. O., & Amoateng, P. (2015). Africa's urbanisation: implications for sustainable development. *Cities*, **47**, 62-72.
- Cobbinah, P. B., Erdiaw, M. O., & Amoateng, P. (2015). Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries. *Environmental Development*, **13**, 18-32.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi: Konsep, Teknik, Dan Aplikasi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Soja, S. J., Anokic, A., Jelic, D. B., & Maletic, R. (2016). Ranking EU countries according to their level of success in achieving the objectives of the sustainable development strategy. *Sustainability*, **8 (306)**.
- Kim, D. H., Moon, T. H., Kim, D. H., & Hong, Y. K. (2008). Hanguk ui hyeoksin eul wihan mirae IT agenda dochul (Future IT agenda for innovation korea). *Telecommunication Review*, **18 (1)**.
- Bonciu, F. (2007). The japanese concept of sustainable development at a global level. *Romanian Economic and Business Review*, **2 (2)**.
- Moon, T. H. (2009). Korea's sustainable development strategy. *Korea Observer*, **40 (1)**.
- Singh, R., & Debnath, R. M. (2012). Modeling sustainable development: India's strategy for the future. *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, **9 (2)**.
- Hauff, M. V., Chandran, D., & Saraswati, L. R. (2013). Challenges for a national sustainability strategy of india. *Internationales Asien Forum*, **44**, 1-2.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, **15 (1)**.
- Rozikin, M. (2012). Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di kota batu. *Jurnal Review Politik*, **2 (2)**.